

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian sekaligus ketahanan pangan Indonesia. Tercermin dari kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 14,35 persen pada tahun 2025 pada triwulan. Badan Pusat Statistik memperkirakan dalam sisi pangan bahwa pada tahun 2026 luas panen padi nasional mencapai sekitar 10,1-10,3 juta hektar dengan produksi sekitar 53-52 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka yang menunjukkan bahwa keberlanjutan produksi padi nasional masih sangat bergantung pada ketersediaan sarana produksi, terutama pupuk untuk menjaga tingkat produktivitas dan ketahanan pangan nasional (Badan Pusat Statistik, 2026).

Ketahanan pangan nasional juga ditunjang dengan ketersediaan pupuk yang merupakan salah satu sarana produksi yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Oleh karena itu pada tahun 2003 mulai diberlakukan fasilitas dari pemerintah berupa penyediaan pupuk bersubsidi dalam sektor pertanian dan perkebunan. Pemberlakuan fasilitas penyediaan pupuk bersubsidi ini diharapkan hasil produktivitas tani dapat meningkat yang kemudian diikuti dengan meningkatnya pendapatan petani. Pupuk bersubsidi juga tidak hanya meningkatkan pendapatan tapi juga menciptakan kesejahteraan bagi petani (Dalimunthe *et al.*, 2021).

Skala pertanian regional, Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan aktivitas produksi padi yang besar. Sehingga kebutuhan sarana produksi pertanian, termasuk pupuk, juga tinggi. Kondisi ini dapat dilihat dari data luas panen padi yang

menunjukkan Jawa Timur berada pada salah satu provinsi dengan capaian luas panen yang menonjol pada setiap periode. Hingga pada bulan september sampai desember Jawa Timur memegang puncak pada urutan pertama atau paling tinggi dengan luas panen padi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2025).

Tabel 1.1. Luas Panen Padi (Hektar) Menurut Provinsi pada Bulan September-Desember 2025

No	Provinsi	Luas Panen (Ha/Bulan)			
		September	Oktober	November	Desember
1.	Jawa Timur	1.134.430,58	862.190,10	603.481,36	443.618,94
2.	Jawa Barat	109.558,85	99.078,30	95.450,84	81.151,46
3.	Jawa Tengah	124.308,36	157.701,27	139.144,82	97.377,29
4.	Sulawesi Selatan	116.088,47	87.508,52	69.083,82	56.190,28
5.	Sumatera Selatan	209.370,07	95.767,36	54.167,10	18.447,73
6.	Lampung	71.315,72	35.835,97	17.761,19	18.239,37
7.	Sumatera Utara	107.201,97	60.736,98	17.411,66	11.444,85
8.	Banten	64.702,20	36.042,26	24.479,17	22.845,18
9.	Nusa Tenggara Barat	35.683,30	16.064,32	7.757,87	9.610,70
10.	Aceh	17.784,61	15.118,15	11.488,50	10.774,41

Sumber: (BPS Provinsi Jawa Timur, 2025)

Pemerintah khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto banyak membuat kebijakan mengenai pembangunan dan perbaikan di sektor pertanian, seperti bantuan subsidi pupuk, yang tujuannya tidak hanya kesejahteraan petani tetapi juga meningkatkan semangat petani untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, khususnya tanaman padi, karena pupuk salah satu faktor utama bertani. Pertanian tanaman pangan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu tanaman padi dan palawija. Tanaman padi merupakan salah satu bahan pangan strategis yang ada di Kabupaten Mojokerto, bahkan di Indonesia. Kebijakan pemerintah salah satunya untuk meningkatkan produktivitas pertanian adalah program pupuk bersubsidi, yang dikelola oleh Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian di tingkat

daerah. Program tersebut bertujuan untuk menyediakan pupuk dengan harga terjangkau bagi petani kecil, sehingga dapat meningkatkan hasil panen komoditas strategis seperti padi, jagung, dan kedelai.

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Timur dimana sektor pertanian memegang peran yang cukup strategis dalam pembangunan ekonomi di karena sebagai sumber pencaharian dan sumber penyediaan bahan pangan utama yang menjadikannya sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat di Kabupaten Mojokerto. Sektor Pertanian terbagi menjadi tujuh sub sektor, yaitu sub sektor tanaman pangan, sub sektor kehutanan, sub sektor perkebunan, sub sektor hortikultura, sub sektor peternakan, sub sektor perikanan, dan jasa pertanian. Namun data potensi tanaman pangan dan hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto paling banyak di tanaman padi dan jagung (Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, 2025).

Tabel 1.2. Data Potensi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Mojokerto

No	Komoditas	Potensi (Ha) / Tahun	Lokasi
1.	Padi/GKP	58.357	Seluruh Kecamatan
2.	Jagung	34.874	Seluruh Kecamatan
3.	Kedelai	939	Kec. Bangsal, Mojoanyar, Dlanggu, Sooko, Trowulan, Gedeg, Kemlagi
4.	Cabai Rawit	3.552	Kec. Dawarblandong, Jetis, Pacet, Ngoro, Trawas
5.	Cabai Merah	37	Kec. Gondang, Pacet
6.	Bawang Putih	27	Pacet
7.	Bawang Merah	632	Kec. Pacet, Trowulan

Sumber: (Data Primer Diolah 2025)

Pemerintah menjalankan kebijakan pupuk bersubsidi yang diatur antara lain melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Sholeh dan Ringgih (2017), berpendapat bahwa dengan penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi

pupuk bersubsidi bertujuan agar petani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang lebih terjangkau dan tepat sasaran termasuk penguatan mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai basis data penerima manfaat. Permentan Nomor 1 Tahun 2024 melakukan perubahan terhadap Permentan 10 tahun 2022, antara lain untuk menyesuaikan jenis pupuk, kategori penerima bantuan, dan alokasi pupuk bersubsidi sebagai respon atas perubahan lahan pertanian dan kebutuhan perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi (Kementerian Pertanian, 2024).

Rigi *et al.* (2019), menjelaskan pupuk bersubsidi adalah bantuan barang yang diawasi pemerintah dimana pengadaan sampai penyalurannya diawasi ketat dan mendapat subsidi dari pemerintah diperuntukkan kepada kelompok tani dan petani di sektor pertanian. Pupuk bersubsidi disebut bentuk bantuan yang dikeluarkan pemerintah agar petani bisa meningkatkan mutu dan hasil pertanian atau perkebunan. Pupuk berperan memperbaiki kesuburan tanah, meningkatkan pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman, serta berpengaruh nyata terhadap produktivitas apabila diterapkan sesuai rekomendasi pemupukan spesifik lokasi.

Pupuk bersubsidi merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian yang terdiri dari jenis Pupuk UREA, SP-36, ZA, NPK dan Organik, sedangkan kecamatan trowulan sendiri bantuan subsidi pupuk terdapat 4 jenis yaitu Pupuk UREA, ZA, Phonska dan Organik sesuai kebutuhan. Produsen yang memproduksi pupuk organik dan anorganik bersubsidi untuk kebutuhan nasional, yaitu: PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri), PT. Pupuk Kaltim (PKT), PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT. Pupuk Petro Kimia Gresik (PKG), dan PT. Pupuk Kujang. Selanjutnya ditingkat daerah akan dipilih distributor untuk

mengelola jumlah pupuk agar sesuai kebutuhan tiap daerah (PT Pupuk Indonesia, 2022).

PT Pupuk Indonesia adalah pelaksana dalam subsidi pupuk yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengadaan sampai distribusi pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan pengecer sesuai pembagian wilayah tanggung jawab masing-masing agar distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan fleksibel, efektif dan efisien. Pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh produsen kepada distributor resmi yang telah ditunjuk sesuai wilayah kerjanya. Selanjutnya distributor menyalurkan kepada pengecer resmi, yang kemudian akan disalurkan oleh pengecer resmi kepada petani/kelompok tani yang berada di wilayah kerjanya. Produsen, distributor dan pengecer wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah kerja tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

Menurut penelitian Ahsani (2021), bahwa subsidi pupuk tidak selalu efektif apabila distribusi tidak lancar, terjadi kelangkaan, atau alokasi tidak sesuai kebutuhan riil petani. Hal ini berarti efektivitas penggunaan pupuk tidak ditentukan oleh besar atau kecilnya anggaran, namun juga kualitas dalam tata kelola dan distribusi pupuk bersubsidi ditingkat lapangan yaitu lembaga pendukung di tingkat desa, terutama penyuluh pertanian. Ketidaksesuaian dari realisasi distribusi pupuk di lapangan juga merupakan suatu kendala yang tidak bisa dihindarkan. Waktu datang pupuk yang tidak sesuai jadwal kedatangan juga berdampak pada masa tanam dan keberhasilan petani pada masa tanam.

Hasil observasi awal dan koordinasi awal dengan pihak penyuluh di Kecamatan Trowulan, distribusi pupuk bersubsidi di wilayah ini masih menghadapi beberapa persoalan lapangan yang perlu mendapat perhatian. Permasalahan yang

sering muncul yaitu ketidaksesuaian waktu ketersediaan pupuk dengan kebutuhan musim tanam, perbedaan antara kebutuhan yang diusulkan dalam RDKK dengan realisasi pupuk yang dapat ditebus petani, serta informasi kebijakan pupuk yang belum merata di tingkat kelompok tani. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian petani harus menyesuaikan jadwal pemupukan atau mencari alternatif pupuk lain di luar subsidi yang berpotensi menambah biaya usahatani. Selain itu, terdapat keluhan yang bersifat administratif, seperti pemahaman petani yang berbeda terhadap tata cara penebusan maupun perubahan aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fisik dari pupuk, tetapi juga membutuhkan pendampingan agar pelaksanaannya berjalan tertib dan tepat sasaran.

Tabel 1.3. Data Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025

No	Jenis Pupuk	RDKK(1) (Kg)	Alokasi (2) (Kg)	Realisasi (3) (Kg)	Selisih (4=1-3) (Kg)	Capaian Alokasi (%)
1.	Urea	1.270.757	1.270.750	1.137.681	133.076	90
2.	Phonska	1.926.730	1.459.070	1.346.364	580.366	92
3.	Organik	627.004	545.000	341.884	285.120	63
4.	Za	223.169	223.170	174.190	48.979	78
Rata-rata						81

Sumber: (Pupuk Indonesia, 2025)

Kesenjangan atau gap antara alokasi dan kebutuhan pupuk di lapangan menjadikan tantangan seperti distribusi yang tidak merata bahkan sampai penyimpangan distribusi. Permasalahan utama terkait pupuk bersubsidi meliputi ketimpangan distribusi yang signifikan, yang terlihat dari data tahun 2025 dimana pemerintah mengalokasikan 9,5 juta ton pupuk melalui sistem e-RDKK, namun laporan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2024), menunjukkan adanya kelangkaan pupuk di beberapa wilayah, sehingga menghambat produktivitas petani secara nyata.

Permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Trowulan terlihat dari masih adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan yang diusulkan petani dan pupuk yang benar-benar dapat ditebus di lapangan. Menurut informasi dari pupuk Indonesia melalui wawancara, diberikan data rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi pada Kecamatan Trowulan. Dapat dilihat dari capaian alokasi tahun 2025 yang rata-rata baru mencapai 81%, sehingga masih terdapat bagian alokasi yang belum terserap penuh oleh petani. Kondisi lain juga dapat dilihat dari jenis pupuk tertentu, terutama pupuk organik yang capaian alokasinya paling rendah yaitu 63%, sementara ZA berada pada 78%, yang bisa dinilai bahwa adanya hambatan yang terjadi baik dari sisi ketersediaan, pola kebutuhan, maupun penyebaran informasi teknis di tingkat kelompok tani. Selain itu, kebutuhan usulan yang belum sepenuhnya terpenuhi juga terbaca dari selisih antara RDKK dan realisasi yang cukup besar, terutama pada Phonska dengan selisih 580.366 kg serta pupuk organik sebesar 285.120 kg, sehingga wajar apabila pada musim tanam tertentu muncul keluhan terkait ketersediaan jenis pupuk yang dibutuhkan.

Bahua (2016), menegaskan bahwa penyuluh yang berkinerja baik mampu memposisikan dirinya sebagai motivator, edukator, fasilitator, dan dinamisator yang berdampak pada perubahan perilaku petani dalam berusaha tani. Penyuluh memiliki peran strategis dalam mendampingi petani dan kelompok tani, terutama dalam proses penyusunan dan pembaruan RDKK pada tiap tahunnya, penyuluh bersama Dinas Pertanian dan pupuk Indonesia juga berperan dalam sosialisasi aturan pupuk bersubsidi. Dengan kata lain, kinerja penyuluh dalam kegiatan distribusi pupuk bersubsidi bukan hanya sebagai aspek pendukung, tetapi menjadi bagian penting dari keberhasilan program pemerintah di tingkat lapangan.

Persoalan tentang kinerja penyuluh pertanian dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Trowulan terdapat beberapa kejadian yang pernah terjadi, menurut hasil wawancara dengan petugas pupuk Indonesia yang bertugas di Kabupaten Mojokerto melalui hasil rekapitulasi hasil penyaluran pupuk di Kecamatan Trowulan terdapat kesenjangan atau gap dari hasil pengajuan dan alokasi, dimana ada sekitar 19% pupuk belum di alokasikan di Kecamatan Trowulan. Pupuk di Kecamatan Trowulan pernah terlambat untuk diterima petani, sehingga berpengaruh pada potensi kemunduran waktu tanam, atau bahkan memaksa petani untuk mencari alternatif pupuk lain dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa peran dan kinerja penyuluh dalam mengawal distribusi pupuk bersubsidi belum berjalan sepenuhnya optimal, baik karena faktor kompetensi, motivasi, sarana prasarana, dukungan kelembagaan, maupun kendala di lapangan.

Penelitian ini terfokus untuk memberikan gambaran sesuai fakta mengenai kinerja penyuluh pertanian dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, sekaligus menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja tersebut dalam pelaksanaan distribusi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan karena masih belum ada dilakukan di wilayah tersebut mengingat adanya kesenjangan yang terjadi, serta perlunya dikaji untuk mengetahui kinerja penyuluh dalam membantu petani dalam distribusi pupuk bersubsidi yang menjadi relevan dan perlu dilakukan untuk memperoleh rekomendasi perbaikan kinerja penyuluh dalam distribusi pupuk bersubsidi dan penguatan peran penyuluh di Kecamatan Trowulan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kinerja penyuluh pertanian dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian tertera di bawah ini :

1. Menganalisis kinerja penyuluh pertanian dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan:

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian disusun sebagai salah satu upaya menambah wawasan mahasiswa dalam melengkapi kemampuan tentang kinerja penyuluh pertanian dalam distribusi pupuk bersubsidi. Mahasiswa juga memperdalam teori yang diperoleh selama studi di perguruan tinggi untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian dalam distribusi pupuk bersubsidi dengan bantuan perangkat SmartPLS sesuai dengan materi yang diberikan saat praktikum.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai sumber referensi dan literatur tambahan yang dapat digunakan sebagai pengetahuan dan wawasan bagi akademisi perguruan tinggi, serta sebagai pedoman untuk pengetahuan, pembandingan, dan sebagai sumber literatur dalam studi yang memiliki fokus serupa di lingkungan perguruan tinggi.

3. Bagi Petani

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada petani penerima pupuk bersubsidi terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Selain itu, penelitian ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh dalam distribusi pupuk bersubsidi.

4. Bagi Penyuluh

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada penyuluh tentang apa yang perlu diperbaiki kedepan agar pelaksanaan distribusi pupuk di kecamatan trowulan dapat lebih optimal.